PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKO PRIBADI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **504082**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.864.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.441 m2/192 m2 di KAB / KOTA TUBAN, Rp. 514.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/150 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 273.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/140 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
4. Tanah Seluas 1.219 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/130 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 95.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 353.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 76.700.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGOON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 16.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	3.781.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.507.642
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	28.500.000
	Sub Total	Rp.	2.005.488.642
III.	HUTANG	Rp.	105.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.900.488.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.